

NOTA DINAS

Nomor B/ 8 / IJ-IND.2/PR/I/2023

Yth : Bapak Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur I
Perihal : Penyampaian Laporan PP39 Triwulan IV Tahun 2022 Inspektorat I
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tanggal : 4 Januari 2023

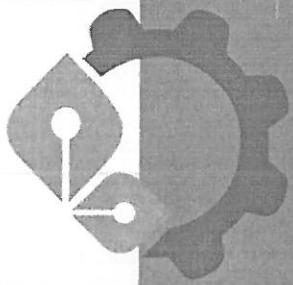
Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan PP39 Triwulan IV Inspektorat I Tahun 2022.

Demikian, atas perkenan dan arahan Bapak Inspektur Jenderal lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal.



**Kementerian
Perindustrian**

REPUBLIC OF INDONESIA

**LAPORAN
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI
PELAKSANAAN
RENCANA
PEMBANGUNAN
INSPEKTORAT I**

TAHUN 2022

INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, Januari 2023

**LAPORAN RENCANA DAN CAPAIAN KEGIATAN
INSPEKTORAT I
TRIWULAN IV
TAHUN 2023**



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

JAKARTA, 4 Januari 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Inspektorat I dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2022.

Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 mengenai Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Laporan ini dibuat untuk melihat besaran sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Inspektorat I Kementerian Perindustrian selama Triwulan IV Tahun 2022.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Inspektorat I atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya membantu Inspektorat Jenderal dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengawasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang capaian kinerja Inspektorat I periode Triwulan IV Tahun 2022. Laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam merencanakan, melaksanakan pada periode berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta, 4 Januari 2023

Inspektur I



Bayu Fajar Nugroho

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program	3
C. Struktur Organisasi	4
BAB II : RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	6
A. Program/Kegiatan Tahun 2022	6
B. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan	8
BAB III : PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN	21
A. Hasil yang Telah Dicapai	21
B. Analisis Capaian Kinerja	25
C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	27
D. Langkah Tindak Lanjut	27
BAB IV : PENUTUP	28
A. Kesimpulan	28
B. Saran	29

**LAMPIRAN : LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV
INSPEKTORAT I TAHUN ANGGARAN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unit kerja pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja dilingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Adapun cakupan satuan kerja Inspektorat I terdiri dari 2 unit kerja pusat yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) dengan 28 satuan kerja vertikal di lingkungan yaitu 9 satuan kerja SMK, 12 satuan kerja Politeknik dan 7 satuan kerja Balai Diklat Industri

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat I bertanggungjawab pada cakupan tugasnya untuk:

1. Melaksanakan kegiatan asuransi dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal;
2. Memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan eselon I;
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I;
4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2021 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2021 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (*Mitra Kerja*).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketatausahaan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
7. Menerapkan audit berbasis resiko.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari :

- 1. Subbagian Tata Usaha**

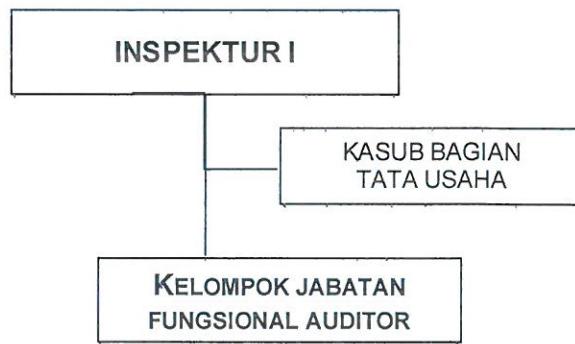
Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat..

- 2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.**

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat I Kementerian Perindustrian sebagai berikut:



Bagan struktur organisasi Inspektorat I terdiri dari

1. Inspektur I
2. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat I.

3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah auditor pada Inspektorat I sebanyak 15 orang terdiri dari:

- a. Auditor Utama : 1 orang;
- b. Auditor Madya : 1 orang;
- c. Auditor Muda : 6 orang;
- d. Auditor Pratama : 7 orang.

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dan kegiatan Inspektorat I adalah **Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindtrian Cakupan Tugas Inspektorat I** dengan kegiatan kerja pada Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1. Layanan Pengawasan Internal Inspektorat I Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	KET
1.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	
2.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	
3.	Layanan Audit Internal	155 Laporan	
	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	26 Laporan	
	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	85 Laporan	
	Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	28 Laporan	
	Konsulting dan Pengawalan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	4 Laporan	

Dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut Inspektorat I pada tahun 2022 memiliki anggaran sebesar Rp 2.108.753.000,- namun pada bulan Desember 2021 telah ditetapkan untuk dilakukan blokir mandiri sebesar Rp. 100.000.000,-, dan blokir adjustment sebesar Rp. 125.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2022

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	VOLUME	PAGU
WA	Program Dukungan Manajemen		2.108.753.000
1841	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat I		2.108.753.000
1841.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		50.000.000
952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran		22.700.000
51	<i>Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran</i>		22.700.000
A	Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran		22.700.000
953	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi		27.300.000
51	<i>Penyusunan Dokumen Evaluasi Dan Akuntabilitas Inspektorat I</i>		27.300.000
A	Penyusunan Evaluasi Triwulanan Dan Tahunan		27.300.000
1841.TBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		2.058.753.000
965	Layanan Audit Internal		2.058.753.000
51	<i>Audit Program Dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</i>		1.058.747.000
A	Pelaksanaan Audit Kinerja		1.048.287.000
B	Pelaksanaan Audit Khusus		10.460.000
52	<i>Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</i>		282.000.000
A	Pelaksanaan Reviu Pipk Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		35.000.000
B	Pelaksanaan Reviu Lk/bmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		153.000.000
C	Pelaksanaan Reviu Rkakl Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		65.000.000
D	Pelaksanaan Reviu Rkbmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		29.000.000
53	<i>Monitoring Dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</i>		73.000.000
A	Pelaksanaan Evaluasi Sakip Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		73.000.000
54	<i>Konsulting Dan Pengawalan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I</i>		645.006.000
A	Pengawasan Program Dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun Berjalan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		263.988.000
B	Pembinaan Dan Pengawasan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		142.862.000

C	Sosialisasi/pendampingan Implementasi Spip Satuan Kerja Cakupan Inspektorat I		238.156.000
	T O T A L		2.108.753.000

Tabel 3. Revisi Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2022 (revisi 11)

Jenis Kegiatan		PAGU Anggaran
1	Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	968.002.000
2	Reviu Laporan Keuangan/bmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	267.570.000
3	Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	172.829.000
4	Consulting Dan Pengawalan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	534.432.000
5	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	16.220.000
6	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	24.700.000
Total		1.983.753.000

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat I yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Target
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I	IKU	1,4%
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I	IK	8%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	85%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat	IKU	91%

2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko satker cakupan tugas Inspektorat I	IK	91,5%
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	75%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	77%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	80%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	80%

TABEL PERHITUNGAN													
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN													
		Untuk memperoleh keyakinan atas keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku											
		Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah kurang <1,4% dari satu koma empat persen.											
		$x \leq 1,4\%$ <p style="text-align: center;">dimana</p> $x = \frac{\Delta mt}{\Delta aa} \times 100\%$											
		<table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td>Δmt</td> <td>:</td> <td>Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian Perindustrian yang bernilai uang</td> </tr> <tr> <td>Δaa</td> <td>:</td> <td>total anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I</td> </tr> </table>	x	:	batas maksimum	Δmt	:	Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian Perindustrian yang bernilai uang	Δaa	:	total anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I		
x	:	batas maksimum											
Δmt	:	Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian Perindustrian yang bernilai uang											
Δaa	:	total anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I											
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I	IKU	8%									

	<p>Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/audit sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja</p> <p>Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> $x \leq 8\%$ <p>dimana</p> $x = \frac{\Delta TPTD}{\Delta R} \times 100\%$ </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">x</td><td style="padding: 2px;">:</td><td style="padding: 2px;">batas maksimum</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">$\Delta TPTD$</td><td style="padding: 2px;">:</td><td style="padding: 2px;">Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">ΔR</td><td style="padding: 2px;">:</td><td style="padding: 2px;">total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun</td></tr> </table>	x	:	batas maksimum	$\Delta TPTD$:	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti	ΔR	:	total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun	
x	:	batas maksimum									
$\Delta TPTD$:	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti									
ΔR	:	total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun									
	<p>Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti</p> <p>Jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk ke sistem dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem dumas</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> $x \geq 85\%$ <p>dimana</p> $x = \frac{\Delta AT}{\Delta AM} \times 100\%$ </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">x</td><td style="padding: 2px;">:</td><td style="padding: 2px;">batas maksimum</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">ΔAT</td><td style="padding: 2px;">:</td><td style="padding: 2px;">Jumlah total pengaduan masyarakat yang terdistribusi</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">ΔAM</td><td style="padding: 2px;">:</td><td style="padding: 2px;">Jumlah total total aduan yang masuk dalam sistem</td></tr> </table>	x	:	batas maksimum	ΔAT	:	Jumlah total pengaduan masyarakat yang terdistribusi	ΔAM	:	Jumlah total total aduan yang masuk dalam sistem	<p>IK</p> <p>85%</p>
x	:	batas maksimum									
ΔAT	:	Jumlah total pengaduan masyarakat yang terdistribusi									
ΔAM	:	Jumlah total total aduan yang masuk dalam sistem									

		<p>Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat</p> <p>Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satuan kerja dibagi dengan jumlah total rekomendasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> $x \geq 91\%$ <p>dimana</p> $x = \frac{\Delta RAHP}{\Delta RHP} \times 100\%$ </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: center;">batas maksimum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$\Delta RAHP$</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ΔRHP</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: center;">total rekomendasi hasil pengawasan</td> </tr> </table>	x	:	batas maksimum	$\Delta RAHP$:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi	ΔRHP	:	total rekomendasi hasil pengawasan	IKU	91%
x	:	batas maksimum											
$\Delta RAHP$:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi											
ΔRHP	:	total rekomendasi hasil pengawasan											
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU	91,5%									
		<p>Hasil penilaian Maturitas SPIP berdasarkan quality Assurance BPKP terhadap Kementerian Perindustrian</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> $x \geq 91,5\%$ <p>dimana</p> $x = \frac{\Delta SMRI}{\Delta SBI} \times 100\%$ </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: center;">batas maksimum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$\Delta SMRI$</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah satuan kerja yang memiliki nilai maturitas level 3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ΔSBI</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah satuan kerja binaan yang dinilai</td> </tr> </table>	x	:	batas maksimum	$\Delta SMRI$:	Jumlah satuan kerja yang memiliki nilai maturitas level 3	ΔSBI	:	Jumlah satuan kerja binaan yang dinilai		
x	:	batas maksimum											
$\Delta SMRI$:	Jumlah satuan kerja yang memiliki nilai maturitas level 3											
ΔSBI	:	Jumlah satuan kerja binaan yang dinilai											
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL													

3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	75%									
		Capaian Inspektorat I berdasarkan nilai yang didapatkan dari monitoring yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal											
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	76%									
		Menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKA-K/L											
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN													
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	70%									
		Tingkat kesesuaian dalam hal jadwal dan komposisi tim dengan yang tertuang dalam dokumen PKPT (dengan toleransi maksimal 1 s/d 4 hari).											
		$x \geq 70\%$ <p>dimana</p> $x = \frac{\Delta RSP}{\Delta RP} \times 100\%$											
		<table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td>ΔRSP</td> <td>:</td> <td>Jumlah Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT</td> </tr> <tr> <td>ΔRP</td> <td>:</td> <td>Jumlah rencana Pengawasan</td> </tr> </table>	x	:	batas maksimum	ΔRSP	:	Jumlah Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	ΔRP	:	Jumlah rencana Pengawasan		
x	:	batas maksimum											
ΔRSP	:	Jumlah Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT											
ΔRP	:	Jumlah rencana Pengawasan											
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	80%									
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan dengan sertifikasi JFA											
		$x \geq 80\%$ <p>dimana</p> $x = \frac{\Delta JFA}{\Delta JP} \times 100\%$											
		<table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td>ΔJFA</td> <td>:</td> <td>Jumlah Penugasan dengan tim yang bersertifikat</td> </tr> <tr> <td>ΔJP</td> <td>:</td> <td>Jumlah Penugasan pengawasan</td> </tr> </table>	x	:	batas maksimum	ΔJFA	:	Jumlah Penugasan dengan tim yang bersertifikat	ΔJP	:	Jumlah Penugasan pengawasan		
x	:	batas maksimum											
ΔJFA	:	Jumlah Penugasan dengan tim yang bersertifikat											
ΔJP	:	Jumlah Penugasan pengawasan											

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT I

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN	TARGET KINERJA				1841	RESIKO UTAMA	ANGGARAN	TARGET KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW 1	TW2	TW3	TW4
Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan satuan kerja tugas Inspektorat I			1,4%		1. Audit Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I 2. Reviu Laporan keuangan dan BMN Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		Rp. 788.241.000,- Rp. 246.202.000,-	16,73% 58,49%	50,18% 38,99%	23,00%	10,99% 2,52%
	Maksimum rekommendasi hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti cakupan tugas Inspektorat I			8%		1. Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I		Rp. 44.000.000,-	45,54%	54,55%	-	-
	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti			85%					-	-	-	-
	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat I			91,5%					-	-	-	-

Tenjungnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Manajemen satker cakupan Inspektorat I	penerapan Risiko tugas		91,5%	Consulting Pengawasan Program Cakupan Kegiatan Tugas Inspektorat I		Rp. 486.167.000,-	32,67%	32,67%	32,67%	1,99%
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL											
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan			75%				-	-	-	-
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN											
Tenjungnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan PKPT dengan PKPT			80%	Anggaran Kerja Inspektorat I		Rp. 32.070.000,-	24,95%	24,95%	25,18%	24,92%
	Tingkat kesesuaian pengawasan SDM sesuai dengan perannya			90%	Evaluasi Kegiatan Inspektorat I		Rp. 8.320.000,-	28,25%	28,25%	28,25%	15,25%

Sehubungan dengan berubahnya kebijakan pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi akibat pandemic terjadi perubahan-perubahan rencana strategis Kementerian Perindustrian sehingga sasaran perkin diubah menjadi, sebagai berikut:

RENSTRA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tar get 2020	Tar get 2021	Tar get 2022	Tar get 2023	Tar get 2024	Peng elola Indik ator	Cara Pengukuran
<i>Stakeholders Perspective</i>									
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1 Batas Toleransi Temuan Materia Pengawasan Eksternal *) IKU	1,50 %	1,4 0%	1,3 0%	1,2 0%	1,0 0%	Ir I, II, III, IV	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bermilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bermilai uang memiliki jumlah <1,4% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin TA 2020
		2 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindak lanjuti	80%	85 %	90 %	95 %	100 %	Ir I, II, III, IV	Jumlah aduan yang telah masuk ke sistem Dumas berkadar pengawasan dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan berkadar pengawasan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		3 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindak lanjuti oleh satker *) IKU	91%	91, 50 %	92 %	92, 50 %	93, 00 %	Ir I, II, III, IV	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah dilindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus: (SR+BSR)/total rekomendasi (T-1), Misal: Penyusunan laporan kinerja tahun 2021, maka data yang digunakan adalah data audit yang dilakukan ditahun Januari-Desember tahun 2020
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1 Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	Lev el 3	Lev el 3	Lev el 4	Lev el 4	Ir I, II, III, IV	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan QA oleh APIP (jika memungkinkan,dilakukan usulan revisi target berdasarkan range level 3 ke Biro Perencanaan)
<i>Internal Process Perspective</i>									

3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektator Jenderal	75%	75 %	80 %	80 %	85 %	Ir I, II, III, IV	Dapat diukur melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner yang disusun berdasarkan AAUPI. Pada tahun 2022, kuesioner akan disebarluaskan setiap kali melakukan kegiatan pengawasan dan diolah oleh masing-masing Kasubag Tata Usaha Setiap Inspektorat setiap akhir Triwulan dan setiap akhir tahun. Persentase tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan diperoleh berdasarkan respon audit yang masuk dan berada pada tingkat "sangat baik". Nilai 100% diperoleh jika seluruh audit menjawab "sangat baik" atau nilai maksimal dari setiap pertanyaan untuk semua pertanyaan dan simpulan akhir kuesioner. Cara pengukuran mengacu pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017
		2	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	76%	77 %	78 %	79 %	80 %	Ir I, II, III, IV	<p>Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling - Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshot penggunaan aplikasi) *pemberian akses ke seluruh auditor - Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll) *Bukti Hasil Telaahan pada semua keg Pengawasan -Penyusunan Kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll) - Iktisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data - Tahap Pelaporan menggunakan Office
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	1	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektoran I/I/I/I/I/V/*)IKU	belum ada	75 %	80 %	85 %	90 %	IR I, II, III, dan IV	<p>RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN.</p> <p>TotA_{P3DN} = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.</p> <p>TotA_{P3DN} = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.</p> <p>Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.</p>
		2								
<i>Learn & Growth Perspective</i>										
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70%	80 %	90 %	100 %	100 %	Ir I, II, III, IV	Menghitung persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.
		2	Tingkat kesesuaian penugasan	80%	90 %	100 %	100 %	100 %	Ir I, II, III, IV	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki

								SDM penga wasan sesuai dengan perann ya	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Sebagaimana tertuang dalam tabel diatas, seluruh sasaran program tersebut telah tertuang dalam perjanjian kinerja Inspektorat I Tahun 2022. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam DIPA Inspektorat I, yang dapat dilaksanakan melalui:

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan:

a. Audit Internal

- Melaksanakan audit kinerja pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
- Melaksanakan audit khusus dengan penugasan Menteri pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal

b. Reviu

- Melaksanakan reviu LK-BMN pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
- Melaksanakan reviu pengadaan barang dan jasa dengan penugasan Menteri pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
- Melaksanakan reviu anggaran pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal

c. Monitoring

- Melaksanakan penilaian SAKIP unit Eselon II dan UPT pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pendampingan implementasi manajemen resiko, sosialisasi, dan pembinaan pengawasan

3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan;
4. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan dan menerapkan penjaminan kualitas yang memadai;

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. Hasil yang Telah Dicapai

Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 sesuai **aplikasi PP39** telah mencapai 99,99% atau sebesar Rp. 1.983.519.970,- dari target 100%, sedangkan realisasi fisik sebesar 100% dari target fisik sebesar 100%.

Terjadi perbedaan perhitungan dengan triwulan III dikarenakan telah dilakukan penyesuaian terhadap blokir mandiri pada pagu anggaran yang semula Rp. 2.105.753.000, menjadi Rp. 1.983.753.000,-

Hasil ini masih telah memenuhi rencana kegiatan yang ditargetkan dengan pelaksanaan, dan pelaksanaan kegiatan yang belum terlaksana di triwulan III telah dapat dilaksanakan dengan baik pada triwulan IV..

Realisasi fisik dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat I dapat dilihat pada Tabel 5. dan Tabel 6.

Tabel 5. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

Output	PAGU Anggaran	Triwulan ini			s/d Triwulan Ini			Sisa Anggaran s/d Triwulan IV		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%
TAK.	1.983.753.000	19,52	382.467.578,40	19,28	100	1.963.915.470	99,99	0	198.375	0,01

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran	Triwulan Iini			s/d Triwulan ini			Sisa Anggaran s/d Triwulan IV		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%
1 Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	968.002.000	13,00	56.531.316,80	5,84	100,00	967.826.771	99,98	-	175.229,00	0,02
2 Reviu Laporan Keuangan/lbmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	267.570.000	43,75	-	-	100,00	66.892.500,00	100,00	-	-	-
Pelaksanaan Reviu Pjpk Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	32.120.000	-	-	-	100,00	32.120.000	100,00	-	-	-
Pelaksanaan Reviu Lkbnm Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	141.480.000	50,00	-	-	100,00	141.480.000	100,00	-	-	-
Pelaksanaan Reviu Rkakl Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	65.000.000	50,00	-	-	100,00	65.000.000	100,00	-	-	-
Pelaksanaan Reviu Rkbnm Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	28.970.000	75,00	-	-	100,00	28.970.000	100,00	-	-	-
3 Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	172.829.000	-	99.829.000,00	57,76	100,00	172.829.000	100,00	-	-	-
Consulting Dan Pengawalaan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	534.432.000	32,64	31.210.828,80	5,84	100,00	178.134.066,33	99,99	-	-	-
Pengawasan Program Dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun Berjalan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	254.130.000	30,75	51.156.369,00	20,13	100,00	254.113.252	99,99	-	16.748,00	0,01
Pembinaan Dan Pengawasan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	150.434.000	28,78	13.057.671,20	8,68	100,00	150.420.947	99,99	-	13.053,00	0,01
Sosialisasi/pendampingan Implementasi Spip Satuan Kerja Cakupan Inspektorat I	129.868.000	38,40	47.349.872,80	36,46	100,00	129.868.000	100,00	-	-	-
Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I	16.220.000	50,00	-	-	100,00	16.220.000	100,00	-	-	-
Evaluasi Kegiatan Inspektorat I	24.700.000	39,27	4.552.210,00	18,43	100,00	24.672.000	99,89	-	28.000,00	0,11
Total	* 983.753.000	35,73	192.123.356	17,56	100,00	1.983.549.970	99,98	-	203.229	0,01

Tabel 6. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat I pada Triwulan II Tahun Anggaran 2022 (Oktober-Desember 2022) sebagai berikut:

1. Uji Fisik Progres Termin I Pekerjaan Pematangan Lahan SMK SMAK Bogor
2. Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN TA 2023 pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
3. Pembahasan Hasil Reviu RKBMN TA 2024 pada BPSDMI
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian P3DN Pasca Bimtek E-Procurement di Solo, Kendal, Yogyakarta
5. Persiapan dan Penyelesaian Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2022
6. Audit Survey Pendahuluan Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2022 pada BPSDMI

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat I s/d Triwulan II Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN PROGRA	INDIKATOR KIN UTAMA	TARGET	CAPAIAN TW IV	TINDAK LANJUT
STAKEHOLDER					
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada Cakupan Tugas Inspektorat I/II/III/IV *)IKU	1,3%	<p>atas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Pada Cakupan Tugas Inspektorat I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2021: Rp304.492.395.632,00 - Realisasi Anggaran BPSDMI TA 2021 : Rp1.080.724.431.321,00 - Total Realisasi Anggaran Cakupan Tugas Inspektorat I : Setjen + BPSDMI = Rp1.385.216.826.953,00 - Temuan Material BPK pada Cakupan Inspektorat I atas temuan LK TA 2021: Rp729.039.198,12 (semua temuan ada pada BPSDMI, Setjen temuan material 0) - Maka, batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada Cakupan Tugas Inspektorat I = temuan BPK pada Cakupan Tugas Inspektorat I / Realisasi Anggaran Belanja pada Cakupan Tugas Inspektorat I TA 2021 = Rp729.039.198,12 / Rp1.385.216.826.953,00 = 0,05%ET 	

		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada Cakupan Tugas Inspektorat I/II/III/IV	90%	100%	Berdasarkan Nota Dinas Nomor 5/IJ.IND.1/KK/V/2022 terdapat 2 pengaduan masyarakat berkadar pengawasan secara online dari total 108 pengaduan hingga Desember 2022
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker Cakupan Tugas Inspektorat I/II/III/IV *)IKU	92%	Belum dapat diukur dikarenakan masih dalam proses 90 hari	
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Hasil penjaminan kualitas dapat disimpulkan bahwa nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3.063 sedangkan nilai MRI sebesar 2,85	Berkoordinasi dengan sekretariat untuk proses tindak lanjutnya
BUSSINES PROCESS					
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat I/II/III/IV	80%	s/d bulan Desember 2022 nilai SKM 3,73 dengan kesimpulan sangat baik	

	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%	100%	<p>kegiatan audit dan reviu telah dilaksanakan</p> <p>Menerapkan RBA (Risk Based Audit)</p> <p>Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshot penggunaan aplikasi) *pemberian akses ke seluruh auditor - Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll) *Bukti Hasil Telaahan pada semua keg Pengawasan -Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll) - Iktisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data - Tahap Pelaporan menggunakan Office
LEARN AND GROWTH				

4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Insepektorat I *)IKU	80%	Total realisasi pada akun indikator P3DN adalah 99,99% dengan rincian 1,3 M dari total pagu	Terdapat pengukuran yang tidak dapat menunjukkan target antara.
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	90%	96%	s/d bulan Desember dari 125 penugasan Kegiatan telah dilakukan sesuai dengan jadwal di PKPT
		Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100%	80%	Kegiatan audit terdapat auditor muda yang masih diperlukan sebagai anggota tim karena masih kekurangan anggota.

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I, terdapat hambatan dan kendala sebagai berikut:

1. Tidak semua kegiatan dapat mendukung kinerja dikarenakan adanya pemotongan anggaran, sehingga pencapaian kinerja tidak berdampak secara signifikan terhadap kinerja Inspektorat Jenderal.
2. Metode *work from home* berdampak terhadap prosedur dan kegiatan Inspektorat I, yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan mengalami transisi dan perubahan prosedur.

D. Langkah Tindak Lanjut

Langkah tindak lanjut atas hambatan dan kendala yang dihadapi pada triwulan I untuk meningkatkan kinerja Inspektorat I adalah melalui peningkatan kerjasama yang sinergis antara lain :

1. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
2. Membudayakan pengendalian resiko ke seluruh satuan kerja sehingga memudahkan pelaksanaan pengawasan.
3. Menerapkan prosedur pengawasan yang berbasis sistem informasi di Inspektorat Jenderal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan kegiatan Inspektorat I Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan IV Tahun 2022 telah berjalan baik sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi anggaran Inspektorat I pada Triwulan IV tahun 2022 sesuai **aplikasi PP39** telah mencapai 19,28% atau sebesar Rp. 382.467.578,- sedangkan realisasi fisik sebesar 19,32%.

Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 sesuai **aplikasi PP39** telah mencapai 99,99% atau sebesar Rp. 1.983.519.970,- dari target 100%, sedangkan realisasi fisik sebesar 100% dari target fisik sebesar 100%.

Terjadi perbedaan perhitungan dengan triwulan III dikarenakan telah dilakukan penyesuaian terhadap blokir mandiri pada pagu anggaran yang semula Rp. 2.105.753.000, menjadi Rp. 1.983.753.000,-

Hasil ini masih telah memenuhi rencana kegiatan yang ditargetkan dengan pelaksanaan, dan pelaksanaan kegiatan yang belum terlaksana di triwulan III telah dapat dilaksanakan dengan baik pada triwulan IV..

B. Saran

Kerjasama dan koordinasi sinergi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat I baik internal maupun eksternal perlu lebih ditingkatkan untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan baik oleh Inspektorat I.

Demikian Laporan Inspektorat I periode Triwulan IV Tahun 2022 untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TRIWULAN – II

TAHUN ANGGARAN 2022

INSPEKTORAT I

FORMULIR A

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2022
INSPEKTORAT I**

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi
2. Nomor Kode dan Nama Fungsi
3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi
4. Nomor Kode dan Nama Program
5. Indikator Hasil
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke
8. Penanggung Jawab Kegiatan
9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan
10. Nomor Surat Pengesahan DIPA
- : (247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
: 04. Ekonomi
: 04.07. Industri Dan Konstruksi
: 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen
: 1841 - Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tug
: 1/1
: Bayu Fajar Nugroho, ST, MPP
: Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 5
: SP DIPA-019.06.1.247885/2022

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output 1	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output) 6	Satuan (Unit) 7
	No. Loan 2	PHLN 3	Rupiah 4	Total 5		
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		-	40,920	40,920		
TBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		-	1,942,833	1,942,833		
Total		-	1,983,753	1,983,753		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Dipertukar	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
.	-	TIDAK ADA KENDALA	-	-

Jakarta Selatan, 4 Januari 2023

Inspektur I Inspektorat Jenderal

Bayu Fajar Nugroho, ST, MPP



Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran	Triwulan Iii			sid Triwulan Iii			Sisa Anggaran sid Triwulan IV		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	%
1 Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat	968,002,000	13.00	56,531,316.80	5.84	100.00	967,326,771	99.98	-	173,229.00	0.02
2 Reviu Laporan Keuangan/Bmnn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat	287,570,000	43.75	-	-	100.00	66,892,500.00	100.00	-	-	-
Pelaksanaan Reviu Pjok Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat	32,120,000	-	-	-	100.00	32,120,000	100.00	-	-	-
Pelaksanaan Reviu Lkbnm Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat	141,480,000	50.00	-	-	100.00	141,480,000	100.00	-	-	-
Pelaksanaan Reviu Rkkl Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat	65,000,000	50.00	-	-	100.00	65,000,000	100.00	-	-	-
3 Pelaksanaan Reviu Rkbnn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat	28,970,000	75.00	-	-	100.00	28,970,000	100.00	-	-	-
Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat	172,429,000	-	99,129,000.00	57.76	100.00	172,329,000	100.00	-	-	-
4 Consulting Dan Pengawalan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat	534,432,000	32.64	31,210,322.80	5.84	100.00	178,154,066.33	99.99	-	-	-
Pengawalan Program Dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun Bergilir Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat	254,130,000	30.75	51,156,365.00	20.13	100.00	254,113,282	99.99	-	16,748.00	0.01
Pembinaan Dan Pengawasan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat	150,434,000	28.78	13,057,671.20	8.68	100.00	150,420,947	99.99	-	13,053.00	0.01
Sosialisasi/Pendampingan Implementasi Siplo Satuan Kerja Cakupan Inspektorat	129,868,000	38.40	47,349,372.80	36.46	100.00	128,868,000	100.00	-	-	-
5 Anggaran Satuan Kerja Inspektorat	16,220,000	50.00	-	-	100.00	16,220,000	100.00	-	-	-
6 Evaluasi Kegiatan Inspektorat	24,701,000	39.27	4,557,210.00	18.43	100.00	24,672,000	99.99	-	28,000.00	0.11
Total	1,983,753,000	35.73	192,123,356	17.56	100.00	1,426,574,337	99.98	-	203,229	0.01